



Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>I Wayan Lendra Universitas Dharma Wacana iwayanlendra99@gmail.com 081278112064</p> <p>Daud Husni Universitas Dharma Wacana Daudhusni@fisipudw.ac.id 081379552093</p> <p>Yuyun Fitriani Universitas Dharma Wacana Yuyunfitriani01.yf@gmail.com 082279779972</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lendra, I. W., Husni, D., & Widayat, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 937-945.

Abstrak

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah gizi kronis, seperti stunting, sekaligus mendukung kualitas pendidikan anak usia sekolah. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sejauh mana kebijakan makan bergizi gratis selaras dengan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi publik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari 200 artikel ilmiah bertema "makan bergizi gratis" dan "good governance", yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan topik dan tren penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas. Implementasi kebijakan yang baik dapat mendorong peningkatan status gizi, partisipasi pendidikan, serta memberdayakan pelaku lokal seperti UMKM. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan makan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

Kata kunci: makan bergizi gratis, good governance, administrasi publik, kebijakan gizi, studi kualitatif

Abstract

The Free Nutritious Meal Policy is one of the Indonesian government's strategic interventions to address chronic nutritional issues such as stunting, while also supporting the quality of education for school-aged children. This study is grounded in the understanding that fulfilling nutritional needs is essential for sustainable human resource development. However, the implementation of this program faces significant challenges, including inadequate infrastructure, limited funding, and insufficient cross-sectoral coordination. The central research question explored in this study is: to what extent does the free nutritious meal policy align with the principles of good governance in public administration? This research adopts a qualitative approach through a literature review and bibliometric analysis. Data were collected from 200 scientific articles related to "free nutritious meals" and "good governance," and analyzed using VOSviewer to map topical relationships and research trends. The findings reveal that the policy is closely linked to key principles of good governance, such as accountability, transparency, efficiency, public participation, and responsiveness. When well-implemented, the program improves nutritional status, supports educational participation, and empowers local stakeholders, including small and medium enterprises. However, the success of the policy depends heavily on strong institutional collaboration, community engagement, and sustainable funding. Therefore, the free nutritious meal program should be viewed not only as a technical solution but also as a reflection of the government's commitment to inclusive governance that prioritizes the needs of vulnerable populations.

Keywords: free nutritious meal, good governance, public administration, nutrition policy, qualitative study

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak (Wulandari and Pasaru 2022). Masalah gizi pada anak-anak menjadi perhatian utama karena kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas hidup di masa depan (Titimeidara and Hadikurniawati 2021). Stunting, sebagai salah satu indikator masalah gizi kronis, menjadi perhatian serius karena prevalensinya yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2018, sekitar 30.8% anak-anak di bawah usia lima tahun di Indonesia mengalami *stunting* (Anggraini and Romadona 2020). Angka ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* masih menjadi isu kesehatan yang signifikan di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 (Yuda et al. 2023). *Stunting* tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada negara secara keseluruhan karena dapat mengurangi potensi ekonomi dan sosial (Suharsih et al. 2023). Tingginya angka *stunting* pada balita disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor-faktor lain termasuk kurangnya pengetahuan ibu, praktik pengasuhan yang buruk, sanitasi dan kebersihan yang buruk, dan rendahnya pelayanan Kesehatan. Pentingnya penanganan *stunting* telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak balita.

Kesehatan dan gizi anak merupakan fondasi krusial bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan, dan hal ini diakui secara global sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa (Natakoesoemah and Adiarsi 2020). Intervensi gizi yang efektif pada usia dini, khususnya pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), terbukti memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas ekonomi individu (Titimeidara and Hadikurniawati 2021). Di Indonesia, masalah gizi seperti stunting masih menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas generasi penerus. *Stunting*, sebagai indikator kronis kekurangan gizi, tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar (Nazidah et al. 2022). Kondisi *underweight* atau kekurangan energi kronis secara berkelanjutan

merupakan awal dari kejadian *stunting* (Santi et al. 2021). Kondisi ini berdampak langsung pada daya pikir, produktivitas belajar, serta perkembangan kognitif dan fisik anak dalam jangka panjang. Ketidakseimbangan antara kebutuhan gizi dan asupan harian, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah, memperparah ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut melalui kebijakan makan bergizi gratis di sekolah, yang mulai dirancang dan diuji coba dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa intervensi gizi yang sistematis pada lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu alat paling efektif untuk menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Secara global, program serupa telah diterapkan di berbagai negara berkembang dan menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, *Mid-Day Meal Scheme* di India dan *School Feeding Program* di Ghana terbukti meningkatkan kehadiran, partisipasi, dan performa akademik siswa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun (Waluyo 2025). Program ini juga bertujuan untuk memberikan makanan bergizi guna meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak, yang dapat membantu menurunkan angka *stunting* serta mendorong partisipasi sekolah di kalangan keluarga miskin. Namun, tantangan besar terkait pendanaan, logistik, dan keanekaragaman kebutuhan nutrisi perlu diatasi agar program ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Meskipun program ini menawarkan banyak manfaat, seperti peningkatan kecukupan gizi dan kesempatan pendidikan yang lebih baik, kekhawatiran terkait dampak fiskal dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan (Dwijayanti 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Kiftiyah (2025) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan Program MBG ialah besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan sehingga pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program MBG harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya (Kiftiyah, Anifatul; et al 2025). Kendala dalam implementasi kebijakan makan bergizi gratis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti ketidaksesuaian kebijakan, perencanaan dan sumber daya yang belum optimal (Ayuni 2025). Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Purnomo, Putikadyanto, and Nur 2025 menyatakan bahwa program makan bergizi gratis secara umum dapat meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, dan generasi emas 2045. Namun, ada berbagai tantangan pada program ini, yaitu: pendistribusian logistik di daerah terpencil. Kedua, standarisasi kesehatan yang belum terstandar dengan baik, pembiayaan yang berkelanjutan, dan perubahan perilaku masyarakat Indonesia (Purnomo, Putikadyanto, and Nur 2025).

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan bentuk intervensi publik yang dirancang untuk menjawab masalah tersebut. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan ini mencerminkan peran negara sebagai penyedia layanan publik (*public service provider*), yang bertugas memenuhi kebutuhan dasar warga negara, khususnya kelompok rentan. Kebijakan ini dapat dikaji melalui lensa beberapa teori administrasi publik yang relevan, untuk memahami kompleksitasnya secara lebih menyeluruh. Pertama, pendekatan *New Public Management* (NPM) menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan hasil (*outcomes*) dalam pelayanan publik. Dalam konteks program makan bergizi gratis, prinsip NPM dapat diterapkan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, pelibatan sektor swasta atau LSM dalam penyediaan makanan, serta pengukuran kinerja berbasis *output* (jumlah siswa yang dilayani, tingkat kehadiran sekolah) dan *outcome* (peningkatan status gizi). Kedua, teori *Governance* menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan kebijakan publik, termasuk pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara. Implementasi kebijakan makan bergizi gratis membutuhkan pendekatan *governance* yang kuat, di mana sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia makanan menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah tidak dapat bertindak sebagai aktor tunggal; ia harus membangun mekanisme koordinasi horizontal dan vertikal yang efektif. Ketiga, *Street-Level Bureaucracy Theory* dari Lipsky (1980) menjadi relevan dalam menganalisis peran pelaksana kebijakan di lapangan, seperti guru, kepala sekolah, dan petugas dapur sekolah. Mereka adalah aktor yang menerjemahkan kebijakan formal ke dalam tindakan nyata. Namun, dalam kondisi keterbatasan sumber daya, mereka sering harus membuat keputusan diskresioner yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika *street-level bureaucracy* penting dalam mengevaluasi efektivitas

program. Keempat, *Equity Theory* dalam administrasi publik menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi layanan. Program makan gratis harus didesain tidak hanya untuk mencakup semua anak sekolah, tetapi juga memperhatikan kelompok yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Penyesuaian menu berdasarkan kondisi lokal, kebutuhan nutrisi spesifik, serta kebijakan afirmatif di wilayah tertinggal menjadi bentuk konkret penerapan prinsip ini.

Kebijakan ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara hadir dalam menjamin hak-hak warga negara. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan makan bergizi gratis menjadi ruang penting untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai *good governance* diterapkan mulai dari akuntabilitas pelaksanaannya, transparansi pengelolaan anggaran, hingga partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasinya. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan semacam ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari koordinasi lintas sektor, potensi penyimpangan dana, hingga minimnya pelibatan masyarakat lokal. Di sinilah pentingnya analisis mendalam secara kualitatif untuk melihat sejauh mana kebijakan ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji relevansi kebijakan makan bergizi gratis terhadap nilai-nilai *good governance* dalam perspektif administrasi publik. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjadi cerminan dari pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.

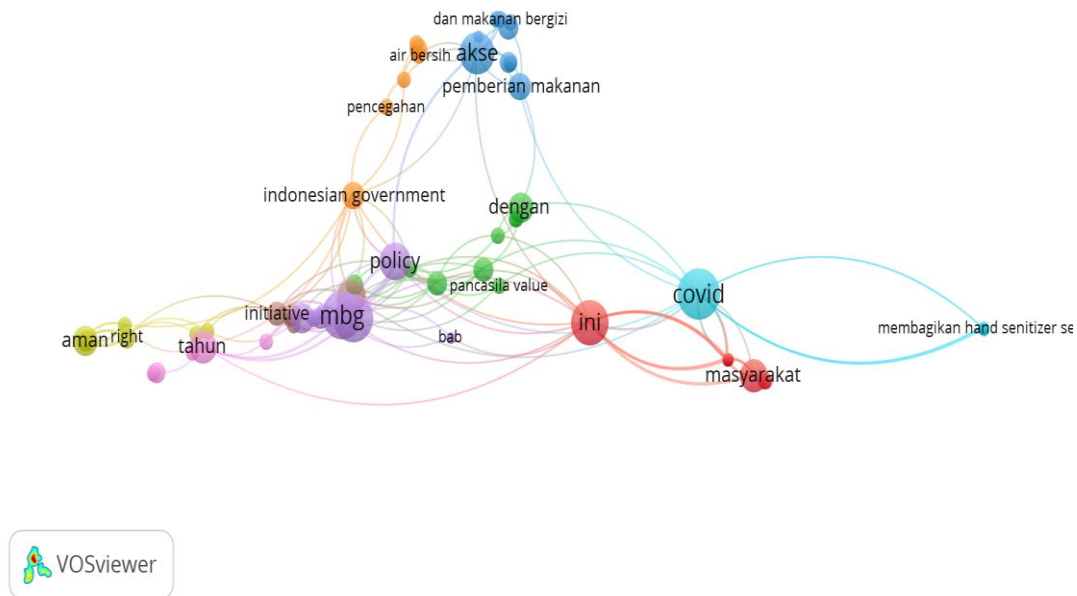
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami apakah kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktik administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari output atau hasil jangka pendek, tetapi juga dari proses tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan secara adil dan demokratis. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti keterkaitan antara program sosial seperti makan bergizi gratis dengan penerapan prinsip *governance* dalam administrasi publik, terutama di konteks lokal atau daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang evaluasi kebijakan berbasis tata kelola yang baik, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

B. Metodologi

Metode pengumpulan data yang digunakan pada pendekatan kualitatif ini adalah studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari beberapa jurnal dan artikel (Budiman et al. 2022). Dengan demikian metode studi kepustakaan dapat memadukan hasil temuan bertema sama sebagai kajian pendahuluan (*preliminary studies*) dengan kajian kekinian. Dengan demikian verifikasi atas kajian terdahulu bisa menemukan unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian selanjutnya (Avriyanti 2021). Studi Pustaka dalam penelitian ini menggunakan analisis bibliometris. Menurut (Pattah, 2013) ada dua jenis kajian yang dicakup dalam bibliometrika: penelitian deskriptif dan kajian evaluatif. "Kajian deskriptif (*Descriptive studies*)" adalah menghitung produktivitas diperoleh dengan menghitung jumlah artikel, buku dan format komunikasi lainnya, sementara kajian evaluasi (*evaluative studies*) adalah menghitung penggunaan literatur yang dibuat dengan menghitung rujukan atau sitiran dalam artikel penelitian, buku, dan format komunikasi lainnya (Budyanto, Pamungkas, and Praditya 2023). Analisis bibliometrik dengan fokus pada literatur terkait Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance. Sumber data utama yang digunakan adalah google scholar dengan menggunakan kata kunci "makan bergizi gratis" dan "good governance" pada judul dokumen artikel. Penelitian ini menelusuri sebanyak 200 artikel yang relevan dengan kata kunci tersebut yang telah dipublikasikan sejak tahun 2020 hingga 2025. Kemudian data yang telah dikumpulkan dipindahkan ke dalam alat analisis Vosviewer untuk pemetaan dan visualisasi jaringan penelitian. Vosviewer digunakan untuk mengidentifikasi tren penelitian, hubungan antara berbagai topik, serta kolaborasi antara peneliti dan institusi. Dengan menggunakan analisis bibliometrik ini, penelitian dapat mengungkapkan pola distribusi pengetahuan, topik yang paling banyak diteliti, dan gap penelitian yang masih ada (Ejaz et al. 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia, baik yang masih dalam tahap percontohan maupun rencana implementasi nasional, memiliki potensi besar sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa dokumen kebijakan yang dikaji termasuk naskah pidato Presiden RI tahun 2023 dan rencana strategis Kementerian Pendidikan menegaskan urgensi program ini dalam menekan angka stunting dan mendukung proses belajar. Berikut hasil meta data dari vos viewer yang bersumber dari 200 literatur ilmiah berbasis google scholar:



Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan VOSviewer, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan multidimensional yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam administrasi publik. Istilah “MBG” muncul sebagai simpul utama yang terkoneksi kuat dengan istilah seperti “*policy*”, “*initiative*”, dan “*indonesian government*”, yang menunjukkan bahwa MBG merupakan bagian dari kebijakan strategis yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana negara hadir untuk menjamin pemenuhan hak dasar warganya, terutama di bidang gizi dan kesehatan. Selanjutnya, visualisasi juga menunjukkan keterkaitan antara MBG dengan aspek aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti air bersih dan upaya pencegahan penyakit, yang tergambarkan melalui kemunculan kata-kata seperti “akses”, “air bersih”, “pemberian makanan”, dan “pencegahan”. Ini menandakan bahwa kebijakan MBG dirancang secara holistik, tidak hanya menasar pemberian makanan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pendukung kesehatan masyarakat. Dalam konteks *good governance*, hal ini menunjukkan adanya keadilan sosial dan integrasi antar sektor pelayanan publik. Kluster lainnya memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan ini dengan kondisi masyarakat dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, yang tercermin melalui kata-kata “covid”, “masyarakat”, dan “membagikan hand sanitizer”. Ini memperkuat dimensi responsivitas pemerintah terhadap kondisi darurat, yang menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang adaptif dan tanggap. Hasil metadata ini juga menunjukkan keterkaitan kebijakan MBG dengan nilai-nilai ideologis dan normatif, seperti yang tercermin dari istilah “pancasila value” dan “aman right” (hak asasi manusia). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya memiliki basis administratif, tetapi juga moral dan ideologis yang berakar pada nilai-nilai dasar bangsa. Dengan demikian, kebijakan MBG dapat dikatakan relevan dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti efektivitas, keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan makan bergizi gratis bukan sekadar intervensi teknis, melainkan wujud komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

Implementasi kebijakan makan bergizi gratis memerlukan fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan responsivitas (Asmara et al. 2022). Disisi lain, kebijakan makan bergizi gratis, sebagai sebuah program intervensi publik yang masif, memiliki implikasi yang signifikan terhadap implementasi nilai-nilai *good governance* dalam administrasi publik. **Efektivitas** kebijakan ini tidak hanya diukur dari peningkatan status gizi penerima manfaat, tetapi juga dari bagaimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efisiensi diinternalisasikan dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Efektivitas kebijakan Makan Bergizi Gratis dapat dilihat dari sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat khususnya anak-anak serta mendukung perkembangan kognitif dan prestasi belajar peserta didik. Dalam konteks administrasi publik, efektivitas diukur melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan perencanaan dan alokasi sumber daya yang tersedia (Gultom, Khairina, and Salsabila 2024) (Isti'annah and Arif 2023) (Anis, Usman, and Arfah 2021) (Azizah, Rostyaningsih, and Lestari 2023). Jika program ini berhasil menurunkan angka stunting, meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui melibatkan UMKM sebagai penyedia bahan pangan, maka hal tersebut menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mencapai dampak nyata bagi masyarakat. Namun, efektivitas juga sangat bergantung pada sistem pelaksanaan yang baik, mulai dari perencanaan anggaran, distribusi logistik, kualitas makanan, hingga pengawasan. Tanpa koordinasi antarlembaga dan pengawasan yang ketat, program ini rawan menghadapi tantangan seperti pemborosan, penyelewengan anggaran, atau penyediaan makanan yang tidak sesuai standar gizi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan Makan Bergizi Gratis hanya dapat tercapai jika dijalankan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, partisipasi aktif dari masyarakat, dan responsivitas.

Akuntabilitas dalam kebijakan ini menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari setiap aktor yang terlibat, mulai dari perumus kebijakan, pelaksana program, hingga pengawas. Program ini relevan dengan prinsip akuntabilitas, karena mengharuskan pemerintah untuk transparan dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaannya, serta mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. prinsip *accountability* tampak melalui keharusan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta pencapaian target program secara terbuka kepada publik. Selanjutnya, prinsip **Efisiensi** dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis mengacu pada upaya pemerintah untuk memaksimalkan manfaat program dengan menggunakan sumber daya secara hemat, tepat, dan terukur. Efisiensi tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dirancang agar mampu memberikan dampak gizi positif secara luas tanpa pemborosan dana, waktu, dan tenaga. Dalam praktiknya, efisiensi tercermin dari strategi pengadaan bahan makanan yang mengutamakan produk lokal dengan harga terjangkau, sistem distribusi yang minim hambatan logistik, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau pelaksanaan dan evaluasi program secara real-time. Penggunaan data yang akurat untuk menetapkan sasaran juga memperkuat efisiensi dalam penyaluran bantuan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima atau penyimpangan alokasi. Dalam kerangka *good governance*, efisiensi menjadi indikator bahwa kebijakan publik tersebut dijalankan dengan prinsip nilai guna tinggi, memperhatikan keseimbangan antara input dan output, serta menekan pemborosan sumber daya negara. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan bertanggung jawab.

Aspek **transparansi** menjadi krusial dalam Transparansi kebijakan publik, memastikan bahwa informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program makan bergizi gratis tersedia bagi publik (Fadjar Trisakti et al. 2022). Transparansi memastikan bahwa informasi terkait anggaran, target penerima manfaat, mekanisme distribusi, dan evaluasi program tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Transparansi dalam penyaluran anggaran dan evaluasi program juga menjadi indikator penting dari akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, kebijakan ini berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial melalui penyediaan layanan yang merata dan inklusif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance*, kebijakan Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi praktik terbaik dalam manajemen kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Partisipasi masyarakat, termasuk orang tua, ahli gizi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, dapat meningkatkan relevansi dan

efektivitas kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan Makan Bergizi Gratis, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada dukungan pasif, tetapi juga mencakup keterlibatan langsung orang tua, komunitas sekolah, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. Partisipasi ini menjadi esensial untuk menjamin bahwa kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program. Melalui forum-forum musyawarah, pengawasan partisipatif, serta pelaporan terbuka, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran yang konstruktif. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini mencerminkan keberhasilan integrasi nilai transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Maka, kebijakan Makan Bergizi Gratis menjadi bukan sekadar intervensi negara terhadap isu gizi, tetapi juga cerminan dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Selanjutnya,

Responsivitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengenali, memahami, dan menindaklanjuti kebutuhan serta aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan yang dijalankan (Karsono 2023). Aspek ini menjadi semakin penting mengingat keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi sasaran. Pentingnya responsivitas tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk secara proaktif mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, baik melalui mekanisme formal seperti survei dan forum konsultasi publik, maupun melalui saluran informal seperti media sosial dan interaksi langsung dengan masyarakat. Umpan balik ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang berjalan, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks kebijakan makan bergizi gratis, responsivitas dapat diukur dari seberapa cepat dan tepat pemerintah merespon keluhan atau masukan terkait dengan kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, atau dampak negatif lainnya yang mungkin timbul. Pemerintah yang responsif juga akan memastikan bahwa informasi terkait dengan kebijakan tersebut mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut dengan jelas. Selain itu, responsivitas juga mencakup kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat seiring berjalannya waktu. Program Makan Bergizi Gratis ini mencerminkan prinsip *responsiveness* atau responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang terdampak kekurangan gizi. Di sisi lain, keterlibatan berbagai pihak mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat dan sektor swasta menggambarkan penerapan prinsip *collaborative governance* yang menekankan kerja sama lintas sektor.

D. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan demokratis sangat bergantung pada fondasi yang kuat, yaitu prinsip-prinsip *good governance*, yang menjadi elemen krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implementasi *good governance* bukan hanya menjadi tujuan normatif, tetapi juga imperatif strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang efektif merupakan indikator utama keberhasilan *good governance*, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan efisien. Namun, realitasnya, pelayanan publik seringkali diwarnai oleh masalah transparansi dan akuntabilitas yang rendah, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ideal.

E. Referensi

- Anggraini, Yuli, and Nur Faizah Romadona. (2020). "Review of Stunting in Indonesia." *Proceedings of the International Conference on Early Childhood Education and Parenting 2019* (ECEP 2019) 454 (Ecep 2019): 281–84. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200808.055>.
- Anis, Irawani, Usman, J., & Arfah S. R., (2021). "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa." *E-Journal UNIMUS* 2, 3: 1105–16.

- Asmara, Dewi, A., Gultom, A., Salam, R., & Handayani. N. (2022). "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 6 (2): 259. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163>.
- Avriyanti, Shinta. (2021). "Strategi Bertahan Bisnis Di Tengah Pandemi Covid-19 Dengan Memanfaatkan Bisnis Digital Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tabalong)." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 5 (1): 60–74. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.380>.
- Ayuni, Tri. D. (2025). "DILEMA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SISWA Dinda Tri Ayuni 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa." *Triwikrama: Jurnal Multi Disiplin Ilmu Sosial* 8 (8).
- Azizah, Aprilia, Rostyaningsih, D., & Lestari. H., (2023). "Efektivitas Program Aplikasi Salaman Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil Kota Bandung." *Journal of Public Policy and Management Review* 12 (2): 389–408.
- Budiman, Farhanuddin, A. F., A Setia, A.A. P., & Jauza. D.,(2022). "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19 (1): 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>.
- Budiyanto, Arief, Pamungkas, I. B., & Praditya. P., (2023). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian Konsumen: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 8 (2): 133–42. <https://doi.org/10.37058/jem.v8i2.5468>.
- Dwijayanti, Avrina. (2024). "Policy Spillover : Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis Terhadap Sektor Pertanian Policy Spillover : Network Analysis of The Impact of Free Nutricious Lunch Policy on the Agricultural Sector." *Jurnal Administrasi Publik XX* (1): 281–308.
- Ejaz, Hasan, Zeeshan, H. M., Ahmad, F., Bukhari, S. N. A., Anwar, N., Alanazi, A., & Sadiq, A. (2022). "Bibliometric Analysis of Publications on the Omicron Variant from 2020 to 2022 in the Scopus Database Using R and VOSviewer." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (19). <https://doi.org/10.3390/ijerph191912407>.
- Trisakti, F., Berliana, A.D.D., Bukhori, A., & Fitr. A. (2022). "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19 (1): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Gultom, Novalia, D., Khairina, E., & Salsabila. L (2024). "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10 (1): 128–36. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516>.
- Isti'anah, Nailul, S & Arif, L., (2023). "Efektivitas Program KALIMASADA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kendangsari." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9 (2): 171–78. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13532>.
- Karsono, Bambang. (2023). "Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Dan Fairness (Literature Review)." *Dinasti International Journal of Management Science* 4 (5): 811–21. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1860>.
- Kiftiyah, Anifatul; Palestina, F. A., Abshar, F. U., Rofiah. K. (2025). "Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio - Political Dynamics." *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan* 5 (1): 1–10.
- Natakoesoemah, Susilowati, & Adiarsi. G., (2020). "The Indonesian Millenials Consumer Behaviour on Buying Eco-Friendly Products: The Relationship Between Environmental Knowledge and Perceived Consumer Effectiveness." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7 (9): 297–302. <http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.2047>.
- Nazidah, Putri, M. D., Fauziah, F., Hafidah, F., Jumiatmoko, & Nurjanah. N. E., (2022). "Pengaruh Stunting Pada Kognitif Anak Usia Dini." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17 (1): 59–72. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.4964>.
- Purnomo, Agus, Putikadyanto, A., & Nur. A., (2025). "Program Makan Bergizi Gratis : Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045." *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Santi, Luca, Golinelli, D., Tampieri, A., Farina, G., Greco, M., Rosa, S., Beleffi, M. (2021). "Non-COVID-19 Patients in Times of Pandemic: Emergency Department Visits, Hospitalizations and Cause-Specific Mortality in Northern Italy." *PLoS ONE* 16 (3 March): 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248995>.
- Suharsih, Ririn, Rahayu, A., Fauziyani, D. A., & Wulandari. D. (2023). "Edukasi Makanan Sehat Dan Pemberian Makanan Tambahan Pada Rukun Warga 25 Kelurahan Cibeureum Rakhma

- Zulfa , Rendy Luqman Fauzan , Rifani Putri Rengganis , Shafa Safira Zulkarnaen Unive.” *BAKTIMU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (4): 169–78.
- Titimeidara, Yoshe, M & Hadikurniawati. W.,(2021). “Implementasi Metode Naïve Bayes Classifier Untuk Klasifikasi Status Gizi Stunting Pada Balita.” *Jurnal Ilmiah Informatika* 9 (01): 54–59. <https://doi.org/10.33884/jif.v9i01.3741>.
- Waluyo, Djoko, S. (2025). “KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS : TINJAUAN EKONOMI.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12 (1): 144–51.
- Wulandari, Rohma, D., & Pasaru. F. (2022). “Pengembangan Rumah Pangan Berbasis Produk Sayuran Organik Untuk Kemandirian Pangan Masyarakat.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 13 (3): 416–20. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i3.4266>.
- Yuda, Aria, Septina, Z., Maharani, A & Nurdiantami, Y. (2023). “Tinjauan Literatur : Perkembangan Program Penanggulangan Stunting Di Indonesia.” *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia* 6 (2). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v6i2.6049>.